RENCANA KERJA

2026

Badan Perencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Sintang
Tahun 2025

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya mejjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan…

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 20);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat serta memperhatikan RPJMN.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Sintang.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah petunjuk umum tentang arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam penyusunan pedoman Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026 adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Renja…

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;

(2) Renja Perangkat Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2026;
2. Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2026;
3. Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026;
4. Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2026;
5. Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Tahun 2026;
6. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaraan dan Penyelamatan Kabupaten Sintang Tahun 2026;
7. Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Tahun 2026;
8. Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2026;
9. Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2026;
10. Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026;
11. Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2026;
12. Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2026;
13. Renja Perangkat Daerah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2026;
14. Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2026;
15. Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2026;
16. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tahun 2026;
17. Renja Perangkat Daerah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2026;

18. Renja...

18. Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2026;
19. Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2026;
20. Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2026;
21. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2026;
22. Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tahun 2026;
23. Renja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sintang Tahun 2026;
24. Renja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang Tahun 2026;
25. Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026;
26. Renja Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026;
27. Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026;
28. Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026;
29. Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Tahun 2026;
30. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026;
31. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026;
32. Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2026;
33. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Tahun 2026;
34. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Tahun 2026;
35. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2026;
36. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2026;
37. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Tahun 2026;
38. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2026;
39. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2026;
40. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Tahun 2026;
41. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun 2026;

42. Renja...

42. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2026;
43. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun 2026;
44. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2026;
45. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun 2026;
46. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2026;
47. Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI SINTANG,

GREGORIUS HERKULANUS BALA

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

KARTIYUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025 NOMOR 26

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan ke khadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang Tahun 2026 dapat tersusun.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sintang ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja ini berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah (5 tahun) yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran strategis daerah yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa Renja Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2026 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak sehingga Bappeda Kabupaten Sintang terus berbenah diri untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal.

Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sintang ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sintang, 31 Juli 2025

KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

KURNIAWAN S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740323 199803 1 005

Daftar Isi

			Hal
KATA PENGANTAR			**i**
DAFTAR ISI			**ii**
DAFTAR TABEL			
BAB I	**:**	**PENDAHULUAN**	
	1.1.	Latar Belakang	**1**
	1.2.	Landasan Hukum	**3**
	1.3.	Maksud dan Tujuan	**6**
	1.4.	Sistematika Penulisan	**7**
BAB II	**:**	**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU**	
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	**8**
	2.1.1	Evaluasi Program Tahun 2024 Anggaran (n-2)	**8**
	2.1.2	Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025 (n-1)	**9**
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**18**
	2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	**27**
	2.4.	Review terhadap rancangan awal RKPD	**34**
	2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	**42**
BAB III	**:**	**TUJUAN DAN SASARAN**	
	3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	**43**
	3.2.	Program dan Kegiatan	**45**
BAB IV	:	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	
BAB V	**:**	**PENUTUP**	**65**

Daftar Tabel

		Hal
Tabel 2.1	Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sintang Tahun 2025	**9**
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	**11**
Tabel 2.3	Analis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	**20**
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	**21**
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2025	**37**
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Barat	**43**
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026	**45**
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027 Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	**47**
Tabel 4.1	Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Bappeda Kab. Sintang	**53**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Propinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibu Kotanya Sintang, mempunyai luas wilayah 21.635 km2. Kabupaten Sintang dihuni penduduk sebanyak 407.901 jiwa, dengan rata-rata 18 jiwa/km2. Seluruh wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 391 Desa. Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan dalam segala sektor, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) tahun 2025 diharapkan dapat menciptakan suatu wadah dan forum yang bisa menyatukan dan mensinkronkan berbagai aspirasi (kebutuhan) dan program kerja/usulan kegiatan masing-masing pihak (stakeholder) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sintang. Sehingga terwujud rencana pembangunan yang aspiratif, proporsional dan akuntabel. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka melalui forum gabungan OPD dilakukan pematangan rencana kerja (renja) OPD untuk dapat menghasilkan prioritas-prioritas kegiatan pembangunan daerah kabupaten sintang yang hasilnya digunakan utuk pemuktahiran rancangan RKPD dengan merujuk kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Sebagai mekanisme perencanaan pembangunan daerah, pemahaman yang menyeluruh terhadap pelaksanaan musrenbang mutlak diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta persepsi yang sama dari setiap stakeholder terhadap musrenbang. Selain itu, diharapkan melalui persepsi dan pemahaman yang benar terhadap musrenbang, setiap stakeholder dapat mengoptimalkan peran masing-masing dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta dalam upaya mendukung persiapan

Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan tertib, terarah dan fokus.

Didalam proses penyusunan renja OPD yang merupakan wadah bersama antara pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang dapat dilakukan melalui proses berikut :

- ✓ Musrenbang desa/kelurahan yang merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan dimana pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dari dampak musyawarah tersebut untuk dapat menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya.
- ✓ Dilakukannya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang mana setiap Desa diharapkan dapat memberikan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan di kecamatan. Yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sintang. Yang mana diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di semua sektor sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pada umumnya.
- ✓ Dari tingkat kecamatan semua prioritas program pembangunan dilanjutkan ke tingkat kabupaten yang akan ditampung oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BAPPEDA). Kemudian dari Bappeda akan menyelenggarakan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah penyelenggaraan forum OPD dan atau forum gabungan OPD yang diikuti oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan urusan OPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademik sehingga penyusunan renja OPD dapat terlaksana dengan baik dan akan menghasilkan suatu peningkatan pembangunan serta perekonomian masyarakat.

- ✓ Keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

Penyusunan rancangan awal rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tetap. Di dalam proses penyusunan rancangan awal rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2026 ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 No. 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

18. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Pewraturan Bupati Sintang Nomor 146 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemangunan Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Sintang Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 Nomor 26).

1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang disusun agar terjadi koordinasi dan konsolidasi antar unit kerja dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2) Tujuan

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
c. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang adalah penjabaran perencanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan– kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait hal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang ini menyajikan dasar pengukuran kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dan perkiraan target Tahun Anggaran 2026.

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2024 Anggaran (n-2)

Untuk membiayai program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tahun Anggaran 2024**,** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 12.698.056.745,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 12.106.358.456** atau **95,34%.**

Pada tahun anggaran 2024 secara umum serapan dana Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang

mencapai **95,34%.** Secara umum hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang**.**

2.1.2 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025 (n-1)

Pada tahun berjalan, yakni Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang mengelola dana APBD sebesar **Rp. 9.817.963.465,-** (Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), dengan rincian **Belanja Operasi** sebesar **Rp. 9.108.343.715,-** (Sembilan Milyar Seratus Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) dan **Belanja Modal** sebesar **Rp. 709.619.750,-** (Tujuh Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Anggaran sebagai mana tersebut di atas adalah untuk membiayai 4 (empat) Program, **18** (delapan belas) Kegiatan dan **62** (enam puluh dua) Sub Kegiatan. Kedepannya Badan Perencanaan Pemangunan Daerah Kabupaten Sintang berharap mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik secara finansial maupun fisik kegiatan yaitu bisa mencapai **100%** atau minimal sama dengan Tahun Anggaran 2024. Berikut kami sajikan tabel ringkasan Anggaran Belanja dan Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.1
Anggaran Belanja dan Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaupaten Sintang Tahun Anggaran 2025

Uraian	Pagu Anggaran
Belanja Operasi	9.108.343.715,00
Belanja Modal	709.619.750
Total	**9.817.963.465,00**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Bappeda Kab. Sintang sampai tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=9-4	11
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5,01	**PERENCANAAN**									
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Output:** Jumlah Dokumen Renstra Bappeda Kab. Sintang Jumlah Dokumen Renja Bappeda Kab. Sintang	1 Dokumen 5 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	- 1 Dokumen	- 1 Dokumen	100% 100%	0 Dokumen 0 Dokumen	100% 100%	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Output:** Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	40%	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Output:** Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	40%	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Output :** Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	40%	
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Output :** Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100%	

5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Output :** Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	40%	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Output :** Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	40%	
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**Output:** Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	40%	
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**Output :** Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	40%	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Output :** Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	-	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	100%	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	**Output :** Terlaksanakannya Bimtek ASN	12 Orang	-	6 Orang	6 Orang	100%	6 Orang	26%	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Output :** Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	40%	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Output :** Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	40%	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Output :** Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	40%	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Output :** Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	40%	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	**Output :** 1 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Tersedia 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Bulan 5 Dokumen	12 Bulan 1 Dokumen	12 Bulan 1 Dokumen	12 Bulan 1 Dokumen	100%	12 Bulan 1 Dokumen	40%	
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	**Output :** Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	40%	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Output :** Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	40%	

5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Output:** Jumlah DokumenPenatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumken	1 Dokumken	1 Dokumken	100%	1 Dokumken	40%	
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**Output:** Jumlah Website Bappeda Kab. Sintang	5 Website	1 Website	1 Website	1 Website	100%	-	100%	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Output :** Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	20%	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	**Output :** Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	8 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	8 Unit	20%	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Output :** Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	100%	
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Output :** Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Output :** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	40%	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Output :** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	20%	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Output :** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	40%	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	**Output:** Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Output:** Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	170 Unit	34 Unit	34 Unit	34 Unit	100%	34 Unit	100%	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Output :** Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	100%	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Output :** Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	

5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Output :** Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	25 Unit	31%		
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**										
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**										
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	**Output :** Jumlah Dokumen Revisi RPJMD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%		
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	**Output :** Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	25 Berita Acara	5 Berita Acara	5 Berita Acara	5 Berita Acara	100%	5 Berita Acara	40%		
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	**Output :** Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	1 Berita Acara	40%		
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	**Output :** Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	70 Usulan	14 Usulan	14 Usulan	14 Usulan	100%	14 Usulan	100%		
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	**Output :** Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%		
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**										
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	**Output :** Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	40%		
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**Output :** **1** Jumlah kecamatan yang dilakukan monitoring **2** Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	70 kecamatan 20 Laporan	14 Kecamatan 4 Laporan	14 Kecamatan 4 Laporan	14 Kecamatan 4 Laporan	100% 100%	14 Kecamatan 4 Laporan	100% 40%		

5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**									
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**									
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	**Output :** Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	40%	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	**Output :** Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	40%	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	**Output :** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	40%	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	**Output :** Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	40%	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	**Output :** Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	40%	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	**Output :** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	40%	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**									
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	**Output :** **1** Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian **2** Jumlah Laporan Triwulan Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Daerah Kabupaten Sintang yang disampaikan	1 Laporan 20 Laporan	- 4 Laporan	- 4 Laporan	- 4 Laporan	- 100%	1 Laporan 4 Laporan	40% 40%	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	**Output :** Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	40%	

5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	**Output :** Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	40%		
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	**Output :** 1 Jumlah Dokumen TSP/CSR 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	5 Dokumen 5 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	100%	1 Dokumen 1 Laporan	40% 40%		
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	**Output :** 1 Jumlah Dokumen Kegiatan LTKL 2 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5 Dokumen 5 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 100%	1 Dokumen 1 Laporan	40% 40%		
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**										
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	**Output :** Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	40%		
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Infrastruktur	**Output :** 1 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	5 Dokumen 5 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	100% 100%	1 Dokumen 1 Laporan	40% 40%		
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	**Output :** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	40%		
5,05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**										
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**										
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	**Output :** Jumlah Sistem Informasi KelitbanganJumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik Jumlah Sistem Informasi Kelitbangan	3 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Aplikasi	100%		

5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	**Output :** Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**									
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	**Output :** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	20%	
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	**Output :** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	20%	
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**									
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	**Output :** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	20%	
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	**Output :** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	20%	
5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	**Output :** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	20%	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**									
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	**Output :** Jumlah Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	33%	
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	**Output :** Jumlah Laporan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	33%	

Sintang, 7 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

KURNIAWAN, S. Sos, M. Si

NIP. 197403231998031005

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, monitoring, evalusasi dan pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan Bupati. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2025 melaksanakan 6 program dan 17 kegiatan dengan beberapa capaian indikator dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi 7 (tujuh) kegiatan, yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.994.071.101,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.261.469.905,00 atau persentase capaian program sebesar 90,78%. Realisasi anggaran yang masih kurang optimal disebabkan karena pada program ini terdapat belanja gaji ASN yang masih tersisa dengan jumlah cukup besar sampai dengan akhir tahun anggaran.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

   Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, kegaitan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan serta kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran program sebesar Rp. 2.150.149.034,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.

1.147.876.141,00 atau secara persentase capaian programnya mencapai target sebesar 97,65%.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.613.841.546,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.868.736.032,00 atau sebesar 98,89%.

Tabel 2.3

Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah s/d Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Indikator Kinerja Program	Realisasi Capaian Indikator Kinerja
1	2	3	4
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57,15%
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.99%
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.73%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.30%
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.56%
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.10%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.42%
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	26,02%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan RKPD 2022	29,82%
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	19,77%

Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
					Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n -1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
1	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik			-	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	-	-	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
	Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
2	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Pelatihan Input Musrenbang pada Aplikasi SIPD			14 Kecamatan	-	-	-	14 Kecamatan	-	-	-	
		Jumlah Pengelolaan Sistem penghubung layanan pemerintahan (SIPD)			1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	
		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			-	-	45 Layanan	45 Layanan	-	-	45 Layanan	45 Layanan	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
	PERENCANAAN												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Bappeda Kab. Sintang			4 Dokumen	1 Dokumen			4 Dokumen	1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Renstra Bappeda Kab. Sintang			4 Dokumen				4 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Buku	1 Dokumen			4 Buku	1 Dokumen			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS			39 Orang	1 Tahun			39 Orang	1 Tahun			
		Jumlah Gaji dan Tunjangan yang Tersedia					12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					39 ASN	39 ASN			39 ASN	39 ASN	
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Biaya OTP			12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan			
		Jumlah Buku Cek			3 Buah	3 Buku			3 Buah	3 Buku			
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD			4 Buku	4 Dokumen			4 Buku	4 Dokumen			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	

8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 Buku	2 Buku	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Buku	2 Buku	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
9	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	1 Dokumen	1 Dokumen		-	1 Dokumen	1 Dokumen	
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	12 Orang	12 Orang		-	12 Orang	12 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			17 Jenis	17 Jenis			17 Jenis	17 Jenis			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket			1 Paket	1 Paket	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor			38 Jenis	36 Jenis			38 Jenis	36 Jenis			
		Jumlah alat bahan komputer			4 Jenis	5 Jenis			4 Jenis	5 Jenis			
		Jumlah alat perabot kantor			21 Jenis	21 Jenis			21 Jenis	21 Jenis			
		Jumlah Minyak Mesin Rumput			92 Liter	92 Liter			92 Liter	92 Liter			
		Jumlah Pakaian Olahraga			11 Buah	12 Buah			11 Buah	12 Buah			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	1 Paket		-	1 Paket	1 Paket	
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	1 Paket	1 Paket		-	1 Paket	1 Paket	
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Rapat			956 Kotak	1155 Kotak			956 Kotak	1155 Kotak			
		Jumlah Bahan Bakar Premium			916 Liter	1642 Liter			916 Liter	1642 Liter			
		Jumlah Bahan Bakar Solar			238 Liter	500 Liter			238 Liter	500 Liter			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	2 Paket	2 Paket		-	2 Paket	2 Paket	
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan			9 Jenis	9 Jenis			9 Jenis	9 Jenis			
		Jumlah Fotocopy			45709 Lembar	45709 Lembar			45709 Lembar	45709 Lembar			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	1 Paket		-	1 Paket	1 Paket	
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar			48 Eksemplar	48 Eksemplar			48 Eksemplar	48 Eksemplar			
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia				-	12 Bulan	12 Bulan		-	12 Bulan	12 Bulan	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	1 Dokumen	1 Dokumen		-	1 Dokumen	1 Dokumen	
17	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Listrik			5 Jenis	5 Jenis			5 Jenis	5 Jenis			
		Jumlah Bahan Bangunan dan Konstruksi			5 Jenis	7 Jenis			5 Jenis	7 Jenis			
		Jumlah Baleho			65 Meter				65 Meter				
		Jumlah Bendera			3 Buah				3 Buah				
		Jumlah Makan Minum Kegiatan Pameran			150 Kotak				150 Kotak				
		Jumlah Umbul-Umbul			20 Buah				20 Buah				
		Jumlah Bahan Cetakan				1 Jenis				1 Jenis			
		Jumlah Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				3 Jenis				3 Jenis			
		Jumlah Makan Minum Aktifitas Lapangan				150 Bungkus				150 Bungkus			
		Jumlah Makan Minum Rapat			150 Kotak	50 Bungkus			150 Kotak	50 Bungkus			
		Jumlah Tenaga Ahli			5 Orang	5 Orang			5 Orang	5 Orang			
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	1 Paket	1 Paket		-	1 Paket	1 Paket	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota			30 Kali	30 Kali			30 Kali	30 Kali			
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten			23 Kali	23 Kali			23 Kali	23 Kali			
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi			4 Kali	4 Kali			4 Kali	4 Kali			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang Terpelihara			119 Kotak	300 Kotak			119 Kotak	300 Kotak			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	

20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website Bappeda Kab. Sintang				1 Website	-	-		1 Website	-	-	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
21	Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi yang Tersedia				2 Unit				2 Unit			
		Jumlah Lemari Arsip yang Tersedia				1 Unit				1 Unit			
		Jumlah Lemari yang Tersedia				1 Unit				1 Unit			
		Jumlah Meja Kerja yang Tersedia				6 Unit				6 Unit			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	5 Unit	5 Unit		-	5 Unit	5 Unit	
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop yang Disediakan			2 Unit	3 Unit	-		2 Unit	3 Unit	-		
		Jumlah Mesin Rumput yang Disediakan				1 Unit	-			1 Unit	-		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	3 Unit			3 Unit	3 Unit	
23	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung	Jumlah AC yang Tersedia				2 Unit				2 Unit			
		Jumlah PC Tersedia			1 Unit				1 Unit				
		Jumlah TV Tersedia			4 Unit				4 Unit				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit			1 Unit	1 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Rp. 3.000			100 Buah				100 Buah				
		Jumlah Materai Rp. 6.000			250 Buah				250 Buah				
		Jumlah Materai Rp. 10.000				300 Buah				300 Buah			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Air yang Tersedia			12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan			
		Jumlah Jasa Internet yang Tersedia			12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan			
		Jumlah Jasa Listrik yang Tersedia			12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan			
		Jumlah Jasa Telepon yang Tersedia			12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jaminan Asuransi Non PNS			13 Orang	11 Orang			13 Orang	11 Orang			
		Jumlah Jasa Tenaga Administrasi			3 Orang	2 Orang			3 Orang	2 Orang			
		Jumlah Tenaga Keamanan			2 Orang	2 Orang			2 Orang	2 Orang			
		Jumlah Tenaga Kebersihan			8 Orang	8 Orang			8 Orang	8 Orang			
		Jumlah Tenaga Operator Komputer			8 Orang	7 Orang			8 Orang	7 Orang			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan	1 Laporan		-	1 Laporan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	1 Unit	1 Unit		-	1 Unit	1 Unit	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			23 Unit	23 Unit	34 Unit	34 Unit	23 Unit	23 Unit	34 Unit	34 Unit	
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer (PC) yang Dipelihara			11 Unit	10 Unit			11 Unit	10 Unit			
		Jumlah Printer yang Dipelihara			4 Unit	10 Unit			4 Unit	10 Unit			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 Unit	15 Unit			15 Unit	15 Unit	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah AC Terpelihara			21 Unit				21 Unit				
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara				1 Kegiatan				1 Kegiatan			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit			1 Unit	1 Unit	

	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan												
31	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022			1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	
32	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi			1 Kali				1 Kali				
		Jumlah Rapat Koordinasi Keluar Daerah Kabupaten			2 Kali				2 Kali				
		Jumlah Dokumen Forum SKPD				1 Dokumen				1 Dokumen			
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					5 Berita Acara	5 Berita Acara			5 Berita Acara	5 Berita Acara	
33	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi			3 Kali				3 Kali				
		Jumlah Rapat Koordinasi Keluar Daerah Kabupaten			3 Kali				3 Kali				
		Jumlah Rapat Koordinasi Keluar Daerah Provinsi			2 Kali				2 Kali				
		Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksnaan Musrenbang Kab/Kota				1 Dokumen				1 Dokumen			
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					1 Berita Acara	1 Berita Acara			1 Berita Acara	1 Berita Acara	
34	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi ke Dalam Kota			68 Kali	68 Kali			68 Kali	68 Kali			
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan					14 Usulan	14 Usulan			14 Usulan	14 Usulan	
35	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD 2021			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2022			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)					2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												
36	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen			
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan					4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	
37	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Evaluasi kegiatan Pembangunan Kabupaten Sintang			4 Kali				4 Kali				
		Jumlah Laporan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sintang				3 Laporan				3 Laporan			
		Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Monitoring			14 Kecamatan		14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan		14 Kecamatan	14 Kecamatan	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												
38	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan			3 Kali				3 Kali				
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Kabupaten yang Dilaksanakan			9 Kali/OT				9 Kali/OT				
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Provinsi yang Dilaksanakan			9 Kali/OT				9 Kali/OT				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
39	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Monitoring ke dalam Daerah Kabupaten yang Dilaksanakan			14 Kecamatan				14 Kecamatan				
		Rapat Koordinasi dan Teknis yang Dilaksanakan			4 Kali				4 Kali				
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Kabupaten yang Dilaksanakan			3 Kali/OT				3 Kali/OT				
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Provinsi yang Dilaksanakan			3 Kali/OT				3 Kali/OT				
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Dokumen	0 Laporan	0 Laporan		1 Dokumen	0 Laporan	0 Laporan	

40	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Monitoring ke dalam Daerah Kabupaten yang Dilaksanakan			14 Kecamatan				14 Kecamatan				
		Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan			3 Kali				3 Kali				
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Kabupaten yang Dilaksanakan			4 Kali/OT				4 Kali/OT				
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Provinsi yang Dilaksanakan			4 Kali/OT				4 Kali/OT				
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	
41	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Monev Pamsimas dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat			14 Kecamatan				14 Kecamatan				
		Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev TKPK dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat			14 Kecamatan				14 Kecamatan				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Lintas Sektor dalam Kabupaten			14 Kecamatan				14 Kecamatan				
		Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Lintas Sektor Luar Daerah			4 Kali				4 Kali				
		Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Lintas Sektor Luar Provinsi			2 Kali				2 Kali				
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pencapaian Target SDGs			14 Kecamatan				14 Kecamatan				
		Jumlah Kegiatan Koordinasi Monitoring dan evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi			14 Kecamatan				14 Kecamatan				
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD//RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)												
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan (RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang Disusun				-	1 Dokumen	1 Dokumen		-	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)					0 Dokumen	0 Dokumen			0 Dokumen	0 Dokumen	
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			4 Laporan	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	
46	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dalam Kota			14 Kecamatan				14 Kecamatan				
		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Luar Kabupaten/Provinsi			19 Kali				19 Kali				
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian					1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
		Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen TSP/CSR			1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Kegiatan LTKL			1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan												
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	
52	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pelaporan Hasil Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan di Bidang Infrastruktur			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	
53	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannnya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)			4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
54	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
55	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan					1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan												
56	Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				-	0 Laporan	0 Laporan		-	0 Laporan	0 Laporan	
		Jumlah Sistem Informasi Kelitbangan				1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi		1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan												
57	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
58	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				-	0 Dokumen	0 Dokumen		-	0 Dokumen	0 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				-	1 Dokumen	1 Dokumen		-	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Peningkatan IPM Melalui Peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah				-	1 Dokumen	1 Dokumen		-	1 Dokumen	1 Dokumen	

59	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				-	1 Dokumen	1 Dokumen		-	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang				-	1 Dokumen	1 Dokumen		-	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi												
60	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Diseminasi				2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Daerah yang Bersifat Inovatif				-	0 Laporan	0 Laporan		-	0 Laporan	0 Laporan	
61	Sosialisasi dan Diseminasi hasil - hasil Kelitbangan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan				10 Kali	10 Kali	10 Kali		10 Kali	10 Kali	10 Kali	
62	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

Sintang, 7 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

KURNIAWAN, S. Sos, M. Si
NIP. 197403231998031005

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Ketatalaksanaan

Fungsi ketatalaksanaan merupakan bagian yang cukup penting dalam suatu organisasi pemerintahan. Fungsi ini berkaitan dengan proses penyelenggaraan dan mekanisme yang membuat dinamika internal organisasi menjadi dinamis konstruktif yang meliputi proses pengelolaan sistem kerja dan administrasi umum tercakup di dalamnya penyusunan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang berlaku sehingga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban suatu organisasi. Ketatalaksanaan sebagai fungsi sangat menentukan kinerja suatu organisasi karena akan mengatur dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika aktivitas yang terkandung dalam fungsi ketetalaksanaan itu kurang berjalan dengan rapi, jelas dan profesional maka besar kemungkinannya kinerja organisasi dimaksud akan mengarah pada tingkat yang rendah.

Jika dilihat dalam lingkup nasional, arah kegiatan fungsi ketatalaksanaan negara sebenarnya mengacu kepada kebijaksanaan nasional seperti yang diungkapkan dalam strategi pembangunan nasional seperti yang atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang telah menetapkan arah kebijakan bidang penyelengaraan negara antara lain dalam bidang tatalaksana yaitu peningkatan fungsi profesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

demikian, maka kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku institusi perencana akan dapat dicapai secara optimal. Sebagai gambaran fungsi ketatalaksanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, akan dikemukakan beberapa hal yang sangat erat kaitannya dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dalam upaya mendukung efisiensi dan produktifitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sebagai institusi perencana. Beberapa langkah-langkah konkrit pelaksanaan fungsi ketetalaksanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan pedoman tata laksana pelayanan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan menerbitkan pedoman atau petunjuk penyusunan perencanaan.
2. Mengembangkan sistem kearsipan kantor yang jelas, akurat dan transparan sehingga dapat menunjang kegiatan perencanaan, koordinasi, monitoring dan pengendalian pembangunan daerah.
3. Mengembangkan dan menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang dan sekretariat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sehingga terwujud kekompakan dan produktifitas kerja.
4. Menyusun dan menerapkan sistem manajemen ketatausahaan modern.
5. Melakukan prosedur penyusunan perencanaan pembangunan daerah partisipatif seperti Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sehingga dapat mengoptimalkan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
6. Penyusunan pedoman teknis adminsitrasi yang berhubungan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sintang.
7. Melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja sehingga terwujud

pengembangan sistem perkantoran elektronik yang mengacu konsep e-government di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

2. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang adalah melakukan perencanaan (program dan rencana) pembangunan daerah di Kabupaten Sintang. Dalam pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana pembangunan dapat dipilah dalam beberapa kegiatan yaitu proses dan waktu penyusunan program dan rencana pembangunan, jenis program dan rencana pembangunan yang disusun dan produk perencanaan yang telah dihasilkan. Mengenai 3 (tiga) kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Proses dan waktu penyusunan program dan rencana pembangunan.

Sebagai suatu fungsi, penyusunan program dan rencana pembangunan mengacu pada proses perencanaan pada umumnya yaitu:

1. Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
2. Mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan untuk menyusun perencanaan.
3. Mengembangkan berbagai alternatif tindakan yang akan dilakukan.
4. Menetapkan alternatif terbaik.
5. Melaksanakan kegiatan.
6. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Jenis program dan rencana pembangunan yang disusun.

Mengenai jenis program dan rencana pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM)
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4. Program dan rencana pembangunan lainnya

c. Produk perencanaan yang dihasilkan adalah dokumen perencanaan teknis yang bersifat hasil kajian seperti studi kelayakan, rencana induk dan lain sebagainya.

3. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan

Diantara tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sebagai institusi perencana adalah melakukan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan. Dua kegiatan ini sesungguhnya bersifat mendukung guna memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang. Yang dimaksud dengan koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan menyatukan aktifitas, informasi dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Unit Kerja terkait baik dalam lingkup Kabupaten, Propinsi, Regional dan Pusat guna mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan konsultasi adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh informasi/keterangan yang lebih rinci dan baku berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terutama kepada unit kerja pemerintah tingkat atas (provinsi dan pusat).

Seiring pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan aturan yang baru, maka menuntut kegiatan koordinasi dan konsultasi cukup besar guna memproleh kejelasan berbagai aktivitas yang akan, telah dan seharusnya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kekeliruan dan kesalahan dalam menetapkan kegiatan yang akan dilakukan, terutama berkaitan dengan hal-hal prinsip dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

4. Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang juga memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan monitoring, pengendalian dan evalusi kegiatan pembangunan. Keberadaan tugas monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan terkait dengan tugas pokok perencanaan yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan pada dasarnya fungsi yang diarahkan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan khususnya, dilakukan 2 kali setahun (triwulan) yaitu bulan Juli dan November. Sedangkan petugas monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan diatur berdasarkan kelompok tugas yang jumlahnya sekitar 3-7 orang sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dimiliki. Sedangkan lingkup kegiatan monitoring dan pengendalian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah memperoleh dan informasi yang valid tentang pelaksanaan kegiatan di lapangan baik yang menyangkut realisasi keuangan maupun fisik.

Sedangkan kegiatan evaluasi kegiatan pembangunan dilaksanakan 3 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan Juli, November dan awal bulan Januari tahun berikutnya. Kegiatan evaluasi ini secara umum terbagi atas dua jenis yaitu evaluasi internal terhadap kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang. Kegiatan evaluasi kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui pertemuan atau rapat staf khususnya para pemimpin kegiatan beserta staf administrasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan kegiatan evaluasi kegiatan pembangunan di

Kabupaten Sintang melibatkan unit kerja terkait yaitu BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam suatu forum rapat evaluasi kegiatan pembangunan.

Hasil kegiatan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang maupun di seluruh Kabupaten Sintang kemudian dihimpun dalam suatu bentuk laporan evaluasi yang substansinya menjadi bahan untuk menyusun perencanaan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang, memiliki kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang perencanaan pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang secara umum melakukan penyusunan, koordinasi, monitoring dan pengendalian serta evaluasi rencana pembangunan daerah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang juga ikut serta dalam penyusunan APBD Kabupaten beserta dokumen penunjang lainnya melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Jika dicermati pelaksanaan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seperti diuraikan tersebut, hingga tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah yang mengacu kepada perencanaan dari bawah (perencanaan partisipatif) masih belum terlaksana secara optimal dan

sungguh-sungguh di Kabupaten Sintang. Pelaksanaan dan hasil Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang melibatkan seluruh stakeholders belum mampu menghasilkan kesepakatan yang riil dan menjadi pegangan stakeholders. Akibatnya antara aspirasi masyarakat dengan apa yang dilaksanakan pemerintah belum selaras. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya menyamakan persepsi dalam penentuan skala prioritas kegiatan serta penetapan lokasinya, hal ini dikarenakan masih relatif tingginya kepentingan kelompok serta masih rendahnya pemahaman tentang perencanaan partisiptaif. Selain itu, keberadaan Renja OPD masih belum dipahami setiap OPD yang ada sehingga pada saat pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten masih cukup banyak OPD yang belum memiliki Rancangan Renja. Lebih dari itu, persepsi dari stakeholders yang ada masih beragam dan belum sama terhadap kedudukan Musrenbang sebagai mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Sehingga masih ada sebagian stakeholders yang masih menganggap kurang pentingnya RKPD yang merupakan hasil Musrenbang tersebut.

2. Administrasi rencana pembangunan daerah berupa nomenklatur program dan kegiatan masing-masing urusan (wajib dan pilihan) berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk penyusunan rencana yang spesifik masih kurang didukung data yang akurat dan akuntabel. Hampir seluruh OPD masih sangat kurang lengkap dalam mengelola data dan menyampaikannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (ketersediaan data di setiap OPD masih terasa sulit diperoleh dan belum menyampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara lengkap dan tepat waktu).
4. Beberapa dokumen rencana pembangunan yang berkategori sebagai rencana induk masih belum lengkap. Akibatnya, selain menjadi penghalang penyusunan

rencana yang bersifat teknis juga terjadi kekosongan panduan penyelenggaraan pembangunan pada bidang tertentu.

5. Kompetensi aparat perencana terutama di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang masih kurang memadai terutama dilihat dari pengalaman mengikuti diklat atau bimtek yang khusus tentang perencanaan sehingga mempengaruhi kinerja institusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara keseluruhan.
6. Koordinasi penyusunan Renstra dan Renja OPD masih belum optimal dilakukan sehingga masih ada OPD yang belum tuntas menyusun Renstra dan Renja atau penyusunannya mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan.
7. Sinkronisasi dan keterpaduan antar program dan kegiatan pembangunan dari seluruh OPD masih belum optimal, sehingga proses pelaksanaan pembangunan daerah sering mengalami hambatan-hambatan yang mengganggu kinerja pembangunan daerah.
8. Beberapa dokumen rencana teknis sebagai penjabaran rencana umum daerah di berbagai urusan masih belum dapat disusun oleh OPD teknis yang ada.
9. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilakukan setiap OPD masih belum optimal dilakukan. Sehingga kegiatan menghimpun dan analisis terhadap hasil-hasil, permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rencana pembangunan masih belum teridentifikasi secara cermat dan akurat untuk lingkup daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2026 merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada awal Tahun 2025. Rancangan awal RKPD adalah kesepakatan yang dihasilkan oleh OPD dengan usulan dari musrenbang di tingkat Kecamatan.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap program dan kegiatan yang direncanakan pada Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2024
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**-**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**154.187.496,00**	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				**-**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**38.747.200,00**	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**-**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**38.747.200,00**	
1	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	38.747.200,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				**-**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**115.440.296,00**	
	Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**-**	**Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**115.440.296,00**	
2	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	45 Layanan		Penyelenggraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	45 Layanan	115.440.296,00	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
	PERENCANAAN				**-**	**PERENCANAAN**			**9.176.159.059,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.388.997.965,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**-**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**36.822.800,00**	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.696.400,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	22.126.400,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**-**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4.066.362.460,00**	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang Tersedia	12 bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang Tersedia	12 bulan	4.026.176.512,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang		
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.160.000,00	
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	18.026.380,00	

8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.999.768,00	
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.999.800,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**351.322.768,00**	
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	52.059.000,00	
11	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	17.749.768,00	
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	198.044.000,00	
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	83.470.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**-**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**554.892.187,00**	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00	
15	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.464.550,00	
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.325.325,00	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	82.161.726,00	
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	38.404.446,00	
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia	12 Bulan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia	12 Bulan	5.280.000,00	
20	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	32.288.340,00	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	242.029.000,00	
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	24.938.800,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**709.619.750,00**	

23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	510.283.650,00	
24	Pengadaan Mebel	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 paket		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 paket	12.210.000,00	
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	43.634.100,00	
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	80.000.000,00	
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	63.492.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**357.222.000,00**	
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.150.000,00	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	127.200.000,00	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	226.872.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**312.756.000,00**	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.500.000,00	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	84.300.000,00	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	23.643.000,00	
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	20.313.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				-	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**1.147.246.894,00**	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				-	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**			**853.281.179,00**	
36	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Revisi RPJMD	1 Dokumen		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Revisi RPJMD	1 Dokumen	325.699.814,00	

37	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Berita Acara		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Berita Acara	15.665.600,00	
38	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	133.517.000,00	
39	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	14 Usulan		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	14 Usulan	78.754.000,00	
40	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	299.644.765,00	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				**-**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			**293.965.715,00**	
41	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	165.897.210,00	
42	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Monitoring	14 Kecamatan		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Monitoring	14 Kecamatan	128.068.505,00	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**-**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**1.639.914.200,00**	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				**-**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**			**483.327.808,00**	
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	93.897.988,00	
44	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	74.080.600,00	
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	57.935.800,00	
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	69.154.920,00	
47	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	85.841.540,00	

48	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD//RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD//RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	102.416.960,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				**-**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			**469.134.700,00**	
49	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Triwulan Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Daerah Kabupaten Sintang yang disampaikan	4 Laporan		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Triwulan Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Daerah Kabupaten Sintang yang disampaikan	1 Dokumen	80.000.000,00	
50	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	150.134.700,00	
51	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	40.000.000,00	
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	115.000.000,00	
53	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Kegiatan LTKL	1 Dokumen		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Kegiatan LTKL	1 Dokumen	84.000.000,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				**-**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			**687.451.692,00**	
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen	387.456.686,00	
55	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	100.001.490,00	
56	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Pelaporan Hasil Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan di Bidang Infrastruktur	1 Dokumen		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaporan Hasil Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan di Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	79.992.430,00	
57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Dokumen		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	120.001.086,00	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**-**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**487.616.910,00**	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				**-**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**487.616.910,00**	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				**-**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**			**50.000.000,00**	

58	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	-	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	-	
59	Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Dokumen	100.000.000,00	Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Dokumen	100.000.000,00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				**130.000.000,00**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**			**130.000.000,00**	
60	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	130.000.000,00	Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Dokumen	130.000.000,00	
61	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	-	Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Dokumen	-	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				**539.995.600,00**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**			**250.004.900,00**	
62	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	69.999.700,00	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	69.999.700,00	
63	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	250.004.900,00	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	250.004.900,00	
64	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	219.991.000,00	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	219.991.000,00	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				**230.000.000,00**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**			**150.020.244,00**	
65	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Diseminasi	2 Laporan	130.000.000,00	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Diseminasi	1 Laporan	100.020.244,00	
66	Sosialisasi dan Diseminasi hasil - hasil Kelitbangan	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	-	Sosialisasi dan Diseminasi hasil - hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	-	
67	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri	Tersedianya Dokumen Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Dokumen	100.000.000,00	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Tersedianya Dokumen Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Dokumen	50.000.000,00	
	JUMLAH TOTAL				**4.137.199.802,00**	**JUMLAH TOTAL**			**9.960.379.269,00**	

Sintang, 7 April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

KURNIAWAN, S. Sos, M. Si

NIP. 197403231998031005

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didiskusikan dalam pembahasan Forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan besifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sintang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu satu tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun Tujuan Renja Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2026 adalah "***Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas***".

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Bappeda Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran pembangunan Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2025 – 2029 adalah ***Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah***.

Untuk indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama

Bappeda Kabupaten Sintang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	Nilai							IKU
2	Konsistensi Program RKPD kedalam RENJA OPD	%	100	100	100	100	100	100	IKU

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026

Mencermati permasalahan daerah dan memperhatikan substansi RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 serta mengantisipasi berbagai kecenderungan yang akan muncul Tahun 2026, maka Bappeda Kabupaten Sintang menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Memantapkan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagai langkah penguatan untuk mewujudkan RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2029.
2. Mengoptimalkan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang partisipatif dan berkualitas melalui penguatan kemampuan aparat dan institusi perencana serta institusi pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah daerah.
3. Meningkatkan jumlah rencana teknis dan koordinasi pembangunan daerah di segala urusan pemerintahan.

Sedangkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2026 diarahkan sebagaimana pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027 Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sintang

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Sintang Tahun Anggaran 2026	

Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01				PERENCANAAN									
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Rp. 1.123.907.700,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.123.907.700,00	Rp. 1.230.000.000,00
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				Rp. 744.254.300,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 744.254.300,00	Rp. 710.000.000,00
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 123.304.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 123.304.000,00	Rp. 210.000.000,00
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.115.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 19.115.000,00	Rp. 0
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 127.072.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 127.072.800,00	Rp. 0
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 77.620.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 77.620.000,00	Rp. 0
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 397.142.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 397.142.500,00	Rp. 500.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				Rp. 229.653.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 229.653.400,00	Rp. 320.000.000,00
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 129.653.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 129.653.400,00	Rp. 210.000.000,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 150.000.000,00	Rp. 200.000.000,00
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri Kab. Sintang, Sintang, Tanjung Puri		Rp. 150.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 150.000.000,00	Rp. 200.000.000,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Rp. 1.639.927.474,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.639.927.474,00	Rp. 1.007.454.700,00
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Rp. 370.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 370.000.000,00	Rp. 457.454.700,00
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 86.894.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 86.894.000,00	Rp. 112.750.000,00
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.706.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.706.000,00	Rp. 55.000.000,00
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 55.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 55.400.000,00	Rp. 66.000.000,00
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 66.904.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 66.904.000,00	Rp. 75.000.000,00
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.279.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.279.000,00	Rp. 48.704.700,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 75.817.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 75.817.000,00	Rp. 100.000.000,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Rp. 899.999.850,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 899.999.850,00	Rp. 550.000.000,00
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.999.850,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 34.999.850,00	Rp. 55.000.000,00
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 85.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 85.000.000,00	Rp. 110.000.000,00
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 40.000.000,00	Rp. 55.000.000,00
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 60.000.000,00	Rp. 77.000.000,00
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 680.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 680.000.000,00	Rp. 253.000.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Rp. 369.927.624,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 369.927.624,00	Rp. 0,00
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 144.743.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 144.743.700,00	Rp. 0
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 74.913.720,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 74.913.720,00	Rp. 0
5	01	03	2.03	0006	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.270.204,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 150.270.204,00	Rp. 0
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 6.901.989.847,00	Rp. 81.462.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.983.452.747,00	Rp. 0,00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 27.310.044,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 27.310.044,00	Rp. 0,00
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.766.244,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.766.244,00	Rp. 0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.894.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.894.000,00	Rp. 0
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.629.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.629.800,00	Rp. 0
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 5.676.394.234,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.676.394.234,00	Rp. 0,00
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.656.309.534,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.656.309.534,00	Rp. 0
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.628.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.628.000,00	Rp. 0
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.432.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.432.200,00	Rp. 0
5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.024.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.024.500,00	Rp. 0
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 110.172.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 110.172.000,00	Rp. 0,00
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.924.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 39.924.000,00	Rp. 0
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.248.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 70.248.000,00	Rp. 0
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 636.974.369,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 636.974.369,00	Rp. 0,00
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.951.918,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 18.951.918,00	Rp. 0
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.191.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.191.100,00	Rp. 0
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 43.186.250,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 43.186.250,00	Rp. 0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 53.267.876,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 53.267.876,00	Rp. 0
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.800.000,00	Rp. 0
5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.012.225,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.012.225,00	Rp. 0
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 364.601.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 364.601.000,00	Rp. 0
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 21.478.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 21.478.500,00	Rp. 0
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 52.485.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 52.485.500,00	Rp. 0
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 0,00	Rp. 81.462.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 81.462.900,00	Rp. 0,00
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 40.448.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 40.448.400,00	Rp. 0
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 41.014.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 41.014.500,00	Rp. 0
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 321.979.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 321.979.200,00	Rp. 0,00
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.150.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.150.000,00	Rp. 0
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 105.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 105.000.000,00	Rp. 0
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 213.829.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 213.829.200,00	Rp. 0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 129.160.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0.00	Rp. 0,00	Rp. 129.160.000,00	Rp. 0,00
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.010.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 45.010.000,00	Rp. 0
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 65.850.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 65.850.000,00	Rp. 0
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.300.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 18.300.000,00	Rp. 0
Jumlah									**Rp. 9.665.825.021,00**	**Rp. 81.462.900,00**			**Rp. 9.747.287.921,00**	**Rp. 2.237.454.700,00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah adalah Rancangan Awal Rencana kerja dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang untuk Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1 MATRIKS INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAPPEDA KAB. SINTANG

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
URUSAN PERENCANAAN				**13.769.471.143**		**14.809.149.400**		**15.483.091.935**		**16.326.577.782**		**18.104.695.609**	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	70,41	70,41	1.850.000.000	71,01	1.905.500.000	72,19	1.962.665.000	72,78	2.021.544.950	73,37	2.223.660.445	
	Persentase Keselarasaan RPJMD dan Renstra PD	100	100		100		100		100		100		
1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya penyusunan dan pendanaan	100%	100%	895.000.000	100%	921.000.000	100%	950.000.000	100%	990.000.000	100%	1.128.660.445	PPEP
1 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Berita Acara	5 Berita Acara	15.747.244	5 Berita Acara	16.534.606	5 Berita Acara	17.361.336	5 Berita Acara	18.229.403	5 Berita Acara	19.140.873	PPEP
2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten	1 Berita Acara	1 Berita Acara	120.000.000	1 Berita Acara	125.000.000	1 Berita Acara	130.000.000	1 Berita Acara	132.000.000	2 Berita Acara	135.000.000	PPEP
3 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	14 Usulan	14 Usulan	16.530.238	14 Usulan	17.356.750	14 Usulan	18.224.588	14 Usulan	19.135.817	14 Usulan	20.092.608	PPEP
4 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	5 dokumen	5 dokumen	150.000.000	5 dokumen	160.000.000	5 dokumen	170.000.000	5 dokumen	180.000.000	6 dokumen	220.000.000	PPEP

5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	4 Dokumen	4 Dokumen	511.722.518	4 Dokumen	514.608.644	4 Dokumen	520.079.076	4 Dokumen	541.179.730	4 Dokumen	554.426.964	PPEP
6	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	42.000.000	2 Dokumen	47.000.000	2 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	80.000.000	PPEP
7	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	41.000.000	1 Berita Acara	46.000.000	1 Berita Acara	48.000.000	1 Berita Acara	50.000.000	2 Berita Acara	100.000.000	PPEP
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	275.000.000	100%	283.000.000	100%	290.000.000	100%	293.000.000	100%	329.000.000	
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	56.000.000	1 Dokumen	57.000.000	2 Dokumen	80.000.000	PPEP
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	94 org	94 org	150.000.000	94 org	151.000.000	94 org	152.000.000	94 org	153.000.000	94 org	154.000.000	PPEP
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten	1 buku	1 buku	75.000.000	1 buku	80.000.000	1 buku	82.000.000	1 buku	83.000.000	1 buku	95.000.000	PPEP
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	100%	100%	380.000.000	100%	389.000.000	100%	398.000.000	100%	402.000.000	100%	413.000.000	

	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah											
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	252.000.000	1 Laporan	254.000.000	1 Laporan	256.000.000	1 Laporan	260.000.000	PPEP
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	24.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	28.000.000	PPEP
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	110.000.000	2 Laporan	115.000.000	2 Laporan	120.000.000	2 Laporan	121.000.000	2 Laporan	125.000.000	PPEP
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	100%	300.000.000	100%	312.000.000	100%	324.000.000	100%	336.000.000	100%	353.000.000	
1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	200.000.000	PPEP
2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	28.000.000	PPEP
3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	125.000.000	PPEP

Daerah Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten												
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip		70,00 (B)	7.333.139.638	74,68 (BB)	7.441.167.926	78,30 (BB)	8.130.773.405	80,02 (BB)	8.889.157.215	81,45 (A)	9.723.188.080	
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	27.310.044	100%	32.041.048	100%	35.245.152	100%	38.769.667	100%	42.646.633	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	12.786.244	1 Dokumen	16.064.868	1 Dokumen	17.671.354	1 Dokumen	19.438.489	1 Dokumen	21.382.337	SEKRETARIAT
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.894.000	1 Laporan	8.683.400	1 Laporan	9.551.740	1 Laporan	10.506.914	1 Laporan	11.557.605	SEKRETARIAT
3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	6.629.800	4 Laporan	7.292.780	4 Laporan	8.022.058	4 Laporan	8.824.264	4 Laporan	9.706.690	SEKRETARIAT
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.231.720.483	100%	5.753.729.731	100%	6.327.939.904	100%	6.959.571.095	100%	7.654.365.404	
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 org/bln	45 org/bln	5.211.635.783	45 org/bln	5.732.799.361	45 org/bln	6.306.079.297	45 org/bln	6.936.687.227	45 org/bln	7.630.355.950	SEKRETARIAT
2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.628.000	1 Dokumen	11.628.000	1 Dokumen	11.628.000	1 Dokumen	11.628.000	1 Dokumen	11.628.000	SEKRETARIAT
3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.432.200	1 Laporan	3.775.420	1 Laporan	4.152.962	1 Laporan	4.568.258	1 Laporan	5.025.084	SEKRETARIAT

5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2 Dokumen	5.024.500	2 Dokumen	5.526.950	2 Dokumen	6.079.645	2 Dokumen	6.687.610	2 Dokumen	7.356.370	SEKRETARIAT
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	143.472.000	100%	153.432.675	100%	165.131.629	100%	177.818.262	100%	191.582.232	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	33.300.000	1 Paket	36.630.000	1 Paket	40.293.000	1 Paket	44.322.300	1 Paket	48.754.530	SEKRETARIAT
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	10 Org	39.924.000	15 Org	43.916.400	16 Org	48.308.040	17 Org	53.138.844	18 Org	58.452.728	SEKRETARIAT
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Org	10 Org	70.248.000	15 Org	72.886.275	16 Org	76.530.589	17 Org	80.357.118	18 Org	84.374.974	SEKRETARIAT
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Telaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	725.668.111	100%	798.234.922	100%	878.058.414	100%	965.864.256	100%	1.062.450.681	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.951.918	1 Paket	20.847.110	1 Paket	22.931.821	1 Paket	25.225.003	1 Paket	27.747.503	SEKRETARIAT
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42.191.100	1 Paket	46.410.210	1 Paket	51.051.231	1 Paket	56.156.354	1 Paket	61.771.990	SEKRETARIAT
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	24.092.000	2 Paket	26.501.200	2 Paket	29.151.320	2 Paket	32.066.452	2 Paket	35.273.097	SEKRETARIAT
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.955.868	1 Paket	166.051.455	1 Paket	182.656.600	1 Paket	200.922.260	1 Paket	221.014.486	SEKRETARIAT
5	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	5 Bacaan	5 Bacaan	10.800.000	5 Bacaan	11.880.000	5 Bacaan	13.068.000	5 Bacaan	14.374.800	5 Bacaan	15.812.280	SEKRETARIAT

	dan Peraturan Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan	n	n		n		n		n		n		
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.012.225	1 Paket	33.013.448	1 Paket	36.314.792	1 Paket	39.946.271	1 Paket	43.940.899	SEKRETARIAT
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	374.701.000	1 Laporan	412.171.100	1 Laporan	453.388.210	1 Laporan	498.727.031	1 Laporan	548.599.734	SEKRETARIAT
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	21.478.500	1 Dokumen	23.626.350	1 Dokumen	25.988.985	1 Dokumen	28.587.884	1 Dokumen	31.446.672	SEKRETARIAT
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	52.485.500	1 Dokumen	57.734.050	1 Dokumen	63.507.455	1 Dokumen	69.858.201	1 Dokumen	76.844.021	SEKRETARIAT
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	717.473.000	100%	216.233.550	100%	236.902.305	100%	259.637.936	100%	284.647.129	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	3 Unit	591.321.500	2 Unit	78.421.500	2 Unit	86.263.650	2 Unit	94.890.015	2 Unit	104.379.017	SEKRETARIAT
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.325.000	1 Paket	9.157.500	1 Paket	10.073.250	1 Paket	11.080.575	1 Paket	12.188.633	SEKRETARIAT
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	9 Unit	108.280.500	10 Unit	119.108.550	11 Unit	131.019.405	12 Unit	144.121.346	13 Unit	158.533.480	SEKRETARIAT
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	9.546.000	1 Unit	9.546.000	1 Unit	9.546.000	1 Unit	9.546.000	1 Unit	9.546.000	SEKRETARIAT
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	326.412.000	100%	326.412.000	100%	326.412.000	100%	326.412.000	100%	326.412.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.150.000	1 Laporan	3.150.000	1 Laporan	3.150.000	1 Laporan	3.150.000	1 Laporan	3.150.000	SEKRETARIAT
2	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	1	1	105.000.0	1	105.000.0	1	105.000.0	1	105.000.0	1	105.000.0	SEKRETA

	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	00	Laporan	00	Laporan	00	Laporan	00	Laporan	00	RIAT
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	218.262.000	1 Laporan	218.262.000	1 Laporan	218.262.000	1 Laporan	218.262.000	1 Laporan	218.262.000	SEKRETARIAT
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	161.084.000	100%	161.084.000	100%	161.084.000	100%	161.084.000	100%	161.084.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan disediakan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	45.010.000	1 Unit	45.010.000	1 Unit	45.010.000	1 Unit	45.010.000	1 Unit	45.010.000	SEKRETARIAT
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan disediakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	23 Unit	66.250.000	23 Unit	66.250.000	23 Unit	66.250.000	23 Unit	66.250.000	23 Unit	66.250.000	SEKRETARIAT
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	31.524.000	40 Unit	31.524.000	40 Unit	31.524.000	40 Unit	31.524.000	40 Unit	31.524.000	SEKRETARIAT
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	18.300.000	30 Unit	18.300.000	30 Unit	18.300.000	30 Unit	18.300.000	30 Unit	18.300.000	SEKRETARIAT
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi		Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA												

Perencanaan Pembangunan Daerah		Pada Bidang PPM , Infraswill dan Ekonomi SDA											
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	435.000.000	100%	718.454.700	100%	841.712.500	100%	963.129.375	100%	1.083.824.781	
	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	1 Dokumen	102.500.000	1 Dokumen	132.750.000	1 Dokumen	149.662.500	1 Dokumen	169.111.875	1 Dokumen	191.478.656	PPM
	2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	PPM
	3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	89.000.000	1 Laporan	109.350.000	1 Laporan	121.252.500	1 Laporan	144.940.375	PPM
	4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	86.000.000	1 Laporan	95.900.000	1 Laporan	117.285.000	1 Laporan	130.377.750	PPM
	5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	96.866.000	1 Dokumen	132.000.000	1 Dokumen	153.200.000	1 Dokumen	165.520.000	1 Dokumen	179.072.000	PPM

	Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya											
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	-	-	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	PPM
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	44.277.000	1 Laporan	68.704.700	1 Laporan	83.600.000	1 Laporan	108.960.000	1 Laporan	124.856.000	PPM
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	91.357.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	141.000.000	1 Laporan	153.100.000	PPM
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	100%	100%	1.500.000.000	100%	467.000.000	100%	545.000.000	100%	635.000.000	100%	705.000.000	EKOSDA
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	Laporan	0	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	90.000.000	EKOSDA
2	Koordinasi	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EKOSDA

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)												
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan MonitoringdanEvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	95.000.000	1 Laporan	110.000.000	EKOSDA
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	145.000.000	EKOSDA
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EKOSDA
6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	EKOSDA
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan MonitoringdanEvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	77.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	120.000.000	EKOSDA

	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/RenjadenganRKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan Festival Lestari	1.230.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	EKOSDA
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	425.000.000,00	-	550.000.000,00	-	600.000.000,00	-	750.000.000,00	-	900.000.000,00	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	INFRASWIL
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8 OPD			-	-	-	-	-	-	8 OPD	50.000.000,00	INFRASWIL
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8 OPD	8 OPD	75.000.000,00	8 OPD	50.000.000,00	8 OPD	50.000.000,00	8 OPD	50.000.000,00	8 OPD	50.000.000,00	INFRASWIL
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 OPD	50.000.000,00	INFRASWIL

	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bidang Infrastruktur											
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	INFRASWIL
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				-	-	-	-	-	-	8 OPD	50.000.000,00	INFRASWIL
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	8 OPD	-	-	8 OPD	50.000.000,00	8 OPD	-	8 OPD	50.000.000,00	8 OPD	50.000.000,00	INFRASWIL
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	8 Laporan	8 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	INFRASWIL

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanan Pembangunan Kabupaten Sintang pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, program/kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang serta peran aktif stakeholder yang terlibat yang pelaksanaannya berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Dengan ditetapkannya Renja tahun 2026, maka selanjutnya Rancangan Renja ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Sintang, 31 Juli 2025
KEPALA BAPPEDA KAB. SINTANG

KURNIAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740323 199803 1 005